



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
KOMISI IV DPR RI**

- Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : III
Rapat Ke- :
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Dengan : Menteri Kelautan dan Perikanan RI
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, 15 Februari 2022
Waktu : pukul 14.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI
Gedung Nusantara I (KK-IV)
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
- Ketua Rapat : Sudin, S. E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDI P)
Acara : Membahas:
1. *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022; dan
2. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022;
3. Lain-lain.
- Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kepala Bagian Sekretariat Komisi IV DPR RI)
- Hadir : A. Anggota Komisi IV DPR RI:
1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5 dari 11 orang Anggota:
1) Sudin, S.E./Ketua Komisi IV
2) Riezky Aprilia, S.H., M.H.
3) Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si.
4) Vira Ervina, S.E., M.B.A.
5) Maria Lestari, S.Pd.
2. Fraksi Partai Golongan Karya
2 dari 8 orang Anggota:
1) H. Dedi Mulyadi, S.H.
2) Alien Mus
3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
2 dari 7 orang Anggota:
1) G. Budisatrio Djiwandono/Wakil Ketua Komisi IV
2) Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari,

DESS., M.Sc.

4. Fraksi Partai Nasional Demokrat
1 dari 6 orang Anggota:
Rusdi Masse Mappasessu/Wakil Ketua
Komisi IV
 5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
3 dari 6 orang Anggota:
 - 1) Anggia Erma Rini, M.K.M./Wakil Ketua
Komisi IV
 - 2) Luluk Nur Hamidah, M.Si., M.P.A.
 - 3) Edward Tanur, S.H.
 6. Fraksi Partai Demokrat
1 dari 5 orang Anggota:
Muslim, S.HI, M.M.
 7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
1 dari 5 orang Anggota:
H. Johan Rosihan, S.T.
 8. Fraksi Partai Amanat Nasional
0 dari 4 orang Anggota:
-
 9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
0 dari 2 orang Anggota
-
- B. Pemerintah
1. Menteri Kelautan dan Perikanan RI;
 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI;
 3. Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

.. Rapatnya hari ini dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, saya minta tolong.. tolong didenger dulu temen-temen saya minta tolong ya karena waktunya juga sudah mepet, saya minta hanya juru bicara fraksi saja, tidak perlu ada pendalaman karena kita sudah kita sudah beberapa kali juga rapat dengar pendapat. Ya setuju ya Pak Johan ya? Jadi tadi Pak Menteri bilang karena usulan Pak Johan, nanti Bioflok-nya nanti ditambah untuk Pak Johan 5, termasuk yang untuk yang lain-lain juga maksudnya.

Kita mulai ya.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan..

Hari ini tumben empat Pimpinan hadir dan semua pakai jas lagi yang lelaki. Jadi yang Pimpinan.. salah satu Pimpinan itu yang situ tuh namanya Pak Rusdi Masse. Kemarin kita bilang sama dia, yang dijagain cuma Kementan sama LHK, kalau KKP *nggak* dijagain, makanya saya bilang minta supaya hadir hari ini.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV,
Yang terhormat Menteri Kelautan dan Perikanan beserta jajaran, serta
Hadirin yang kami hormati.

Mengawali rapat hari ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat mengadakan Rapat Kerja dalam keadaan sehat *wal 'afiat*.

Sesuai dengan jadwal acara rapat Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 yang telah diputuskan dalam Rapat Pengganti Bamus tanggal 6 Desember 2021 dan keputusan Rapat Internal tanggal 12 Januari 2022 pada hari ini Selasa tanggal 15 Februari 2022, Komisi IV menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam agenda membahas:

1. *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022;
2. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022; dan
3. Lain-lain.

Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Rapat Kerja hari ini kita mulai pada pukul 14.20 WIB dan akan kita akhiri pukul 16.00 WIB. Apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 254 ayat (2) tentang Tata Tertib atau atas kesepakatan bersama dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat;
2. Penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan;
3. Tanggapan Anggota Komisi IV;
4. Jawaban Menteri Kelautan dan Perikanan;
5. Kesimpulan rapat;
6. Penutup.

Apakah acara dapat disetujui?

**KETUK PALU 1X
(RAPAT: SETUJU)**

Rapat Kerja hari ini merupakan tindak lanjut RDP pada tanggal 9 Februari yang lalu dan Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya di mana berdasarkan Surat Menteri Keuangan nomor

S-1088/MK.02.2021 tanggal 29 November 2021 perihal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian dan Lembaga Tahun Anggaran 2022, Kementerian Kelautan dan Perikanan diharuskan melakukan pencadangan anggaran sebanyak 5% dari anggaran Rupiah Murni sebesar Rp296.580.000.000,-, sehingga total sebesar Rp5,9 triliun dari pagu anggaran semula sebesar Rp6,1 triliun.

Dengan adanya *automatic adjustment* tersebut, Komisi IV tidak akan lelah untuk mengingatkan berulang-ulang kali kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan langkah-langkah strategis, secara cermat, tidak melakukan.. dan tidak melakukan pencadangan anggaran terhadap program dan kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat kelautan perikanan dalam rangka menumbuhkan dan membangkitkan ekonomi nasional.

Untuk itu Komisi IV meminta penjelasan adanya penyesuaian anggaran program kegiatan 2022 secara rinci dan transparan, terutama dalam program bentuk bantuan Pemerintah yang dinilai sangat dibutuhkan dan ditunggu oleh masyarakat kelautan perikanan.

Selain itu Komisi IV juga meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan di tengah pandemi Covid-19 yang kembali meningkat akibat adanya varian baru Omicron, agar terus tetap menjaga kondusifitas masyarakat dengan bergerak cepat dalam memberikan solusi dan jalan keluar atas permasalahan yang ada pada masyarakat kelautan dan perikanan saat ini. Seperti adanya permasalahan perizinan kapal dan lain-lain, serta masalah pupuk bersubsidi untuk petambak ikan, sehingga tidak ada lagi demonstran, demonstrasi yang memicu masyarakat berkerumun yang membuat penyebaran virus Covid-19 menjadi lebih cepat.

Kemarin Pak Menteri, saya sarankan kepada yang menggantikan Pak Sekjen untuk segera membuat surat ke Kementerian Keuangan agar Pupuk untuk petambak dapat disalurkan pada triwulan ke-2, mungkin pada bulan Juli atau bulan selanjutnya. Selain itu kami juga ingin mendengar kemarin Dirjen PSDKP dengan Dirjen PRL katanya ke Pulau Rupa atau kemana minta.. saya minta penjelasannya. Kebetulan nanti pada waktu reses kalau tidak ada perubahan tanggal 20 apa 21, kami Komisi IV berkunjung ke Riau, sekalian kita panggil pemiliknya juga sekalian kita meninjau masalah kebun sawit yang konon katanya ilegal.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Demikian pengantar kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada saudara Menteri Kelautan perikanan untuk menyampaikan penjelasan terkait hal-hal di atas.

Silakan.

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Terima kasih Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Selamat sore,
Salam sejahtera bagi kita semuanya,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan Bapak Ibu Anggota Komisi IV DPR RI.

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan Rapat Kerja antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Komisi IV DPR RI dengan agenda pembahasan:

1. *Automatic Adjustment* Belanja KKP Tahun Anggaran 2022; dan
2. Rencana program dan kegiatan Tahun 2022.

Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati,

Sebagaimana telah kami sampaikan pada Rapat Kerja tanggal 26 Januari 2022 bahwa sesuai arahan Presiden pada sidang kabinet Paripurna tanggal 17 November 2021, setiap Kementerian/Lembaga agar melakukan pencadangan anggaran atau *automatic adjustment* sebesar 5% dalam rangka mitigasi dampak berlanjut dan memburuknya kondisi pandemi Covid-19 di tahun 2022. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan nomor S-1088/MK.02/2021 tanggal 29 November 2021 perihal *Automatic Adjustment* Belanja K/L TA 2022, KKP harus melakukan *automatic adjustment* dari anggaran Rupiah Murni sebesar Rp296.586.883.000,-. Adapun *Automatic Adjustment* KKP Tahun 2022 dilakukan pada komponen kegiatan penunjang seperti belanja tunjangan kinerja, honor perjalanan dinas, paket *meeting*, belanja barang operasional dan non operasional dengan tidak mengurangi *output* kegiatan prioritas.

Pada kesempatan ini kami mengusulkan perubahan Pagu Alokasi Anggaran KKP Tahun 2022 berdasarkan unit Eselon I, yakni menjadi:

1. Ditjen Perikanan Tangkap tetap sebesar Rp792,2 miliar;
2. Ditjen Perikanan Budidaya semula Rp1,13 triliun menjadi Rp1,07 triliun;
3. Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan semula sebesar Rp903 miliar menjadi Rp923 miliar;
4. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tetap sebesar Rp377,2 miliar;
5. Ditjen Pengelolaan Ruang Laut tetap sebesar Rp378,7 miliar;
6. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan tetap sebesar Rp1,37 triliun;
7. Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan tetap sebesar Rp493,4 miliar;
8. Sekretariat Jenderal semula Rp586,8 miliar menjadi Rp621 miliar; dan

9. Inspektorat Jenderal tetap sebesar Rp82,5 miliar.

Selain terjadi pergeseran pagu antar unit Eselon I juga terjadi pergeseran pagu antar program, yaitu dari program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dan program Kualitas Lingkungan Hidup kepada program Dukungan Manajemen dan Rp36,7 miliar.

Usulan pagu berdasarkan program menjadi:

- Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan sebesar Rp2,1 triliun;
- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri sebesar Rp172,89 miliar;
- Program Kualitas Lingkungan Hidup sebesar Rp83,19 miliar;
- Program Riset dan Inovasi IPTEK sebesar Rp26,74 miliar;
- Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebesar Rp273,07 miliar;
- Program Dukungan Manajemen sebesar Rp3,45 triliun.

Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati,

Guna mendukung pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan, KKP telah merancang kegiatan prioritas pada tahun 2022 yang akan diberikan untuk kepentingan para nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar, petambak garam, dan masyarakat pesisir lainnya. Hal tersebut ditujukan untuk percepatan pemulihan ekonomi yang diharapkan dapat memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan.

Kami menargetkan kegiatan bantuan pada masyarakat dapat diselesaikan seluruhnya paling lambat pada Semester I Tahun 2022, untuk itu kami mohon dukungan dari Komisi IV DPR RI.

Untuk rincian rencana kerja KKP Tahun 2022 *pasca automatic adjustment* per masing-masing unit kerja Eselon I sebagaimana bahan rapat kerja yang telah disampaikan.

Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati,

Demikian yang dapat kami sampaikan pada Rapat Kerja kali ini. Kami mohon dukungan dan persetujuan Komisi IV DPR RI. Seluruh saran, masukan, dan rekomendasi dari Komisi IV DPR RI akan menjadi bahan acuan untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kelautan dan Perikanan tahun 2022.

Terima kasih.

Wabillahi taufiq wal hidayah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Om shanti shanti shanti om.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (RUSDI MASSE MAPPASESSU):

Terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan Pak Menteri. Selanjutnya kami persilakan kepada Anggota untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Pimpinan. Interupsi.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (RUSDI MASSE MAPPASESSU):

Sabar dulu Ibu Kiki. Ini sebenarnya Bu Kiki kita udah tahu apa yang dia mau interupsi, tapi sabarlah dikit karena dari mitra juga udah oke.

Yang pertama saya persilakan Ibu Endang.

F-P.GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M. Sc):

Baik. Terima kasih Pak Ketua yang saya hormati.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua,

Om swastiastu,

Namo buddhaya, dan

Salam kebajikan,

Kepada yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV, Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan yang saya banggakan beserta jajarannya, Pak Sekjen dan Pak Dirjen semuanya.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah bahwa kita sampai saat ini dalam keadaan sehat walaupun Pak Sekjen sempat Isoman ya Pak.

Sehubungan dengan pembahasan materi Rapat Kerja di Komisi IV tentu saja kami dari Partai Gerindra ingin mewakili Fraksi Gerindra ingin menanyakan beberapa perubahan yang diajukan oleh Kementerian Kelautan. Jadi kami tentu saja yang sudah menentukan CPCL ingin mengingatkan kembali bahwa tahun sebelumnya masih banyak bantuan program yang belum terealisasi. Nah mohon ada inventarisasi datanya sehingga kami bisa bersosialisasi di dapilnya masing-masing.

Kemudian yang kedua perubahan pagu anggaran yang diajukan KKP. Contohnya seperti komitmen-komitmen yang Bapak Menteri kemukakan tentu saja kami mengharapkan untuk pemulihan ekonomi rakyat, jadi para nelayan kita sebaiknya dilindungi. Nah hal ini tentu saja harus ada juknis yang jelas Pak untuk pengelolaan dana-dana bergulir yang sudah ada, karena kami menekankan agar juknis ini dapat mempermudah proses. Nah juga dengan

adanya KUR tentu saja ini mempermudah para UKM kita untuk mengakses kreditnya.

Yang keempat usulan perubahan anggaran KKP tahun 2022. Nah ternyata ini di kawasannya Pak Darori ini Pak, ada budidaya udang seluas 100 hektar di Kebumen, dari nilai Rp250 miliar dipecah menjadi tiga kegiatan. Nah ini mohon klarifikasinya karena ada beberapa evaluasi yang perlu ditindaklanjuti. Kemudian juga ada tambahan katanya Rp35 miliar yang Rp500 juta diambil dari *automatic adjustment* kita. Nah tentu saja mohon klarifikasinya.

Yang kelima anggaran yang lain ini Pak. Jadi tapi masih di Kebumen, apakah memang untuk mengembangkan daya udang seluas 100 hektar tersebut bisa direalisasikan? Nah ini mohon jawaban yang konkrit.

Nah kemudian perubahan pagu anggaran di Sekretariat Jenderal. Nah ternyata ada anggaran penambahan pagu sebesar Rp34.500.000.000,- yang di alokasikan untuk tambahan Pusat Analisa dan Pemantauan Sumber Daya Kelautan Perikanan. Nah dari satu paket menjadi dua paket. Nah kami dari Fraksi Partai Gerindra, mohon penjelasan tentang nilai anggaran pada dua paket tersebut.

Yang berikutnya dalam Rencana Kerja Sekjen KKP pasca *automatic adjustment* tahun 2022 juga terdapat program dukungan manajemen yang dialokasikan Rp10 miliar. Nah mohon dijelaskan dibuat apa anggaran tersebut.

Kemudian yang berikutnya adalah penambahan pagu sebesar Rp20 triliun yang dialokasikan untuk tambahan operasional patroli dari 75 hari menjadi...

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Sepertinya *nggak* ada itu Bu Endang yang Rp20 triliun.

F-P.GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M. Sc):

Oh udah Pak, baik.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Mana ada, orang anggarannya aja cuma 5,9.

F-P.GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M. Sc):

Eh Rp20 miliar Pak, Rp20 miliar, saya yang salah nyebut.

Kemudian yang ke-9 dalam Rencana Kerja KKP Tahun Anggaran 2022 pasca *automatic adjustment* Ditjen Perikanan Tangkap ini Pak, mengalokasikan fasilitas akses permodalan nelayan untuk 1.500 nelayan

anggarannya Rp1,5 miliar yang kemudian dirubah menjadi Rp1,250 miliar. Mengingat nelayan sangat membutuhkan bantuan permodalan, kami mengusulkan untuk tidak dikurangi.

Kemudian berikutnya tadi realisasi KUR Pak, jadi mohon diantisipasi karena banyak sekali yang ingin akses ke KUR.

Kemudian di Karantina Ikan ini Pak, mohon ditindaklanjuti tentang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

Nah kemudian di Penguatan Daya Saing Produk Kelautan terdapat pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan untuk pengembangan *start up* milenial pada 15 UMKM. Nah mengingat sangat pentingnya program ini, kami ingin mohon program ini disiapkan dengan baik dan SOP-nya harus jelas Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Cukup Bu Endang, udah lebih 4 menit.

F-P.GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M. Sc):

Cukup Pak, semuanya sudah saya tulis dengan baik.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Iya nanti diberikan aja.

F-P.GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M. Sc):

Baik.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Jadi kemarin waktu RDP itu kan banyak Anggota yang protes perihal masalah KUR yang.. Direktornya datang *nggak* nih? Nah Direktornya datang dan sudah membawa catatan, nanti dibagikan ke Anggota bagaimana untuk mengakses KUR-nya itu ya, udah dibagikan belum? Tolong segera dibagikan. Ada? Nah itu sudah ada, nanti dilihat, dibaca, nanti kalau ditanya oleh nelayan dapat menjawab dengan baik ya.

Silakan Pak Ketua.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (RUSDI MASSE MAPPASESSU):

Terima kasih Bu Endang.

Untuk berikutnya Pak Johan, 2 menit.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Para Pimpinan yang saya hormati dan Anggota yang tetap setia.

Sebentar dipakai.. sebelum ditegur Mas Budi, pakai masker dulu.

Pak Menteri yang saya hormati,

Saya atas nama Fraksi PKS memberikan persetujuan dan dukungan atas apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri karena kode dari Pak Ketua tadi sudah mengatakan sudah direspon semuanya.

Terima kasih Pak Ketua.

Pada kesempatan ini saya hanya menyampaikan saran mudah-mudahan dengan sedikitnya anggaran kita ini, kita terus membangun integrasi kolaborasi dengan seluruh pihak *stakeholder* perikanan agar kemudian kita bisa membuktikan Pak Menteri bahwa dengan anggaran sedikit ini kita bisa mengelola sumber daya kelautan dan perikanan kita, sehingga kita berharap 2023 anggaran KKP ini meningkat secara drastis lah sesuai dengan luas wilayah kelautan kita.

Yang berikutnya tentu dengan kegiatan dengan anggaran ini kita tidak ingin lagi mendengar ada misalnya penolakan-penolakan dari nelayan kecil karena merasa diskriminasi, ada nelayan kita yang terlantar di tengah laut, ada misalnya kampung-kampung nelayan kita itu kena banjir rob, tidak tertangani, tidak merasakan kehadiran pemerintah di situ. Saya pikir kalau itu terus kita lakukan secara baik, melakukan pendataan pemetaan secara baik *Insy Allah* kami Komisi IV yang terus bersama nelayan dan masyarakat terpinggirkan ini akan tetap mendukung Pak Menteri untuk sukses dalam memenuhi target-target yang sudah ditetapkan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (RUSDI MASSE MAPPASESSU):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Berikutnya Pak Edward.

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Baik.

Selamat siang untuk kita semua.

Izin masker saya kasih turun saja, supaya napas jangan sesak. Ini kita berapi-api *ngomong*, tidak.. itu hanya gurau aja itu.

Jadi terima kasih banyak Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang saya hormati,
Bapak Menteri beserta jajarannya yang sama juga saya hormati,

Hari ini kita memasuki hari yang terakhir dalam rapat untuk menentukan anggaran dari KKP. Memang ada hal-hal yang kita beri masukan belum terjawab secara sempurna, tapi tidak ada masalah bagi saya, yang penting niat kita sama demi kesejahteraan rakyat. Itu yang poinnya ada di situ. Saya masih bingung karena ini beda dengan Pertanian, kalau Pertanian dia punya perincian mengenai dana aspirasi itu jelas. Ini saya buka dari tadi bolak balik-bolak balik ini mana yang jelas ini. Seperti yang lalu saya usulkan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (RUSDI MASSE MAPPASESSU):

Belum dikirim Ketua, sebentar lagi.

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Oh iya. Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Begini Pak Edward.

Tadi sebelum disini konsultasi dalam ruang makan, lagi di fotokopi, nanti akan dibagikan ke semua Anggota. Karena tadi ada penambahan volume, jadi penambahan volume itulah yang kita bagikan. Kalau pengurangan saya *nggak ngomong*, tapi kalau penambahan saya *ngomong*.

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Mantap, mantap saya setuju itu Ketua.

Jadi saya *ngomong* lah sedikit dulu.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Iya, lanjut.

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Jadi begini Pak Ketua.

Yang lalu saya mengusulkan kalau bisa Kapal 5 Gross Ton itu kalau tidak cocok dengan daerah Dapil kita, kita bisa ajukan usulkan untuk diubah bagi.. diubah ke katinting karena saya sudah *ngomong* banyak tentang hal ini di Dapil saya. Jadi tolong ini...

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Saya boleh tanya langsung Dirjennya ya. Pak Dirjen bisa *nggak* ke katinting gantikan yang 5 GT? Izin Pak Menteri supaya langsung di konversi, bisa?

DIRJEN KKP:

Jadi karena kapalnya sudah di TP-kan di provinsi Pak, kami harus komunikasi dulu dengan teman-teman di provinsi. Saya kira akan kami lakukan Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ini, sebetulnya inilah hal ini yang saya mau ngomong. Tadi saya sudah bicara dengan Pimpinan di atas kalau di TP kan kadang-kadang kita tidak punya hak untuk memantau, melihat, mengevaluasi kapal tersebut. Kalau saya berharapnya di pusatkan semua, ya jangan di TP-kan dong.

Betul Pak Edward?

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Betul, setuju Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Iya, itu aja udah ya.

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Bisa saya kira Pak. Pak Ketua, bisa bisa.

F-PDIP (RIEKY APRILIA, S.H., M.H.):

Boleh interpusi *nggak* Ketua?

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Tunggu dulu, Pak Menteri jawab dulu.

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Bisa Pak, bisa.

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Saya lanjut dulu Pak Ketua, saya mungkin masih ada waktu 1 menit mungkin.

Terima kasih banyak Pak Ketua.

Karena saya sudah usulkan itu mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan atensi dari Pak Menteri. Jadi kami.. saya tidak mau berbicara terlalu banyak. Saya hari ini saya lebih fokus pada yang lalu, sidang lalu-lalu. Jadi baik kalau Pak Menteri sudah bilang bisa, terima kasih banyak Pak Menteri karena kami ini wakil rakyat, jangan sampai rakyat marah kami dan tidak pilih lagi kami, padahal saya berharap bisa duduk lagi di sini 5 tahun. Jadi saya memberikan apresiasi pada Pak Menteri.

Dan juga mengenai.. saya kira mengenai program-program yang lain sudah oke, hanya tadi Pak Menteri sampaikan bahwa bantuan-bantuan itu akan diselesaikan untuk tahun ini dalam semester pertama, semoga bisa ya Pak Menteri. Karena yang lalu ini kita masih menemui banyak sekali kendala, paling kendala paling ini itu di indukan, eh bukan, anakan, benih benih ikan tolong minta maaf Pak Menteri tolong diperhatikan itu supaya jangan menjadi apa konflik di bawah.

Saya kira dari PKB hal-hal yang sederhana saja dan yang penting komitmen kita, itu saja.

Terima kasih banyak Pak Ketua. Semoga apa yang sudah kita bicarakan ini bisa menjadi komitmen kita bersama.

Terima kasih.

Selamat sore.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Sudah diganti Pak Edward, *nggak* anakan tapi sudah mulai gadis sekarang. Iya.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (RUSDI MASSE MAPPASESSU):

Berikutnya Kakak Ansi, silakan.

Nggak, jadi gini. Dikit-dikit. Kita putar dulu per fraksi, baru masuk. Setuju ya? Iya.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Bapak/Ibu Anggota Komisi IV yang saya hormati,
Pak Menteri, Pak Sekjen, beserta jajaran Eselon I yang saya hormati.

Yang pertama Pak Menteri tentu terkait dengan *automatic adjustment*, kami memberikan dukungan penuh terkait dengan apa yang dimandatkan oleh Presiden Joko Widodo. Hanya kami pesankan keberpihakan terhadap

nelayan kecil dan tradisional, keberpihakan terhadap para pembudidaya, petambak, dan segala macamnya itu itu tetap harus tampak dalam program-program di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Yang kedua terkait dengan penangkapan terukur, kami masih terus ingin melihat penyempurnaan dari konsep ini Pak, karena bagaimanapun juga konsep ini masih menjadi tanda tanya bagi sebagian kalangan termasuk kami juga, terutama terkait dengan bagaimana memastikan mengawasi kuota sehingga kemudian penangkapannya itu betul-betul terukur dan tidak melebihi kuota.

Yang berikut, kami memberikan apresiasi kepada beberapa hal terkait dengan, nah ini baru sampai ada penambahan di Bioflok katanya ada lima paket, terima kasih.

Yang berikut, kemarin kami sempat bicara juga menyangkut kebijakan yang tidak melulu berperspektif Jakarta terkait dengan verifikasi yang dilakukan terhadap para penerima atau calon penerima alat mesin pembuat pakan. Terus terang Pak Menteri, kami memberi apresiasi karena dalam waktu 1 minggu tim KKP langsung turun ke lapangan, kebetulan ke dapil saya di kota Kupang dan juga di Rote Ndao.

Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pimpinan, saya kembalikan.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Izin Pimpinan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (RUSDI MASSE MAPPASESSU):

Ya silakan Ibu Kiki.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Ya, terima kasih. Sedikit saja mohon maaf teman-teman.

Pak Menteri ini Kapal 5 Ton ini, Pak Sekjen ini Dirjennya ini capek banget kita ngomongin itu dan sering banget kita dicuekin gitu, iya kan. Dikasih tahu udah sering tapi kayaknya diabaikan, padahal kita bicara atas nama masyarakat Pak di sini, kalau Bapak kan dimana aja masih jadi ASN Pak, kita kan di kontrak, ya. Jadi tolonglah kalau mau bermitra dengan baik saling menghargai ya, gitu. Kita ini berpihak sama masyarakat Pak bukan sama orang-orang tertentu *nggak* ada kayak gitu, ini kapal 5 ton ini udah sering banget Kapal 5 GT ini. Itu tadi Pak Edward, Ansi juga. Intinya Pak Kapal 5 GT ini masyarakat itu berat *maintenance*-nya, kan gitu. Jangan tiba-tiba udah ditaruh aja kok enak aja main taruh, emang udah selesai apa?

Terima kasih Pimpinan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (RUSDI MASSE MAPPASESSU):

Iya, jadi ini Bu Kiki apa meluruskan lagi. Padahal sebenarnya tadi udah dijawab Pak Menteri, untuk memperjelas aja nih Bu Kiki.

Berikutnya Pak Muslim. Silakan.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Bukan gitu Pimpinan. Itu Dirjennya suruh dengerin juga lain kali kalau kita ngomong, kasihan Menterinya kan.

F-PD (MUSLIM, S.HI., M.M.):

Terima kasih.

Bu Kiki semangat betul kayaknya siang ini.

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Pak Menteri, Pak Sekjen, beserta jajaran Kementerian KKP,

Pertama tentu saya mengapresiasi ya semangat Pak Menteri luar biasa, saya monitor terus di media sosial, di semua kegiatan ini semangat Pak Menteri luar biasa keliling Indonesia Pak Menteri dengan target terhadap pendapatan negara yang saya pikir ini luar biasa, kita harapkan bisa terwujud ini Pak Menteri ya.

Yang pertama tentu Fraksi Partai Demokrat melihat potensi perikanan kita ini sangat besar namun pemanfaatan tidak maksimal, karena pertama tentu keterbatasan SDM dan anggaran ya kurang dari 1% atau dari APBN kita Pak Menteri. Anggaran KKP Tahun 2022 ini sebesar Rp6,11 triliun ya dengan *automatic adjustment* itu sebesar Rp296,58 miliar. Tentu Fraksi Partai Demokrat meminta agar KKP perlu melakukan langkah-langkah strategis secara cermat dan tidak melakukan pencadangan anggaran terhadap program dan kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat kelautan perikanan dalam rangka menumbuh dan membangkitkan ekonomi nasional, ini beberapa hal.

Kemudian tentu berkaitan yang kedua Pak Menteri permasalahan pupuk subsidi, tentu untuk pembudidaya perikanan ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini tidak lagi menjadi bagian tupoksi dari Kementerian Pertanian ya. F-PD tentu menanyakan sejauh mana KKP dan upaya KKP dalam menyiapkan data valid para pembudidayaan calon penerima pupuk subsidi. Kemudian juga F-PD juga mendorong agar KKP segera memproses usulan pupuk bersubsidi untuk pembudidaya ikan tersebut secara cermat.

Yang ketiga berkaitan pencurian ikan oleh kapal asing ya di Perairan Natuna, masih terjadi Pak Menteri, biarpun dalam beberapa hal terakhir saya pikir udah banyak sangat berhasil dilakukan oleh Kementerian KKP terhadap penangkapan ya kapal-kapal ikan yang tentunya ini sangat merugikan daripada masyarakat.

Kemudian yang berikutnya khusus buat Pak Dirjen Tangkap ini, ini terus terang nih sama kayak Bu Kiki nih. Ini saya kritik Dirjen Tangkap ini saya terus terang ini 2 kali dengan Pak Dedi juga kita sudah mengunjungi Pelabuhan Lampulo, ini tolong diinget Pak Zaini. Kita berjanji berkali-kali, kemudian di ldi kita berjanji, sampai hari ini persoalan pengerukkan ini sekian ribu kapal-kapal nelayan ini *nggak* pernah tersentuh, ini sudah berapa tahun? Artinya ketika kita berjanji ya saya pikir ditepati, makanya waktu itu ada kapal keruk itu saya pikir juga itu dimaksimalkan juga. Jadi misalnya Kementerian KKP punya kapal keruk mana menjadi prioritas, pendangkalan apa TPI-TPI. Terus terang ini kalau kita lihat ke sana sangat menyedihkan Pak Menteri, di satu sisi program Pak Menteri begitu semangat termasuk juga kluster udang vaname, tapi di sisi lain nelayan yang betul membutuhkan lokasi-lokasi TPI yang hari ini sangat menyedihkan Pak Menteri. Itu Pak Zaini kan ikut dampingi kita Pak Zaini, tapi setiap saya tanya Pak Dirjen, katanya *nggak* ada anggaran, dengan mudah menjawab tidak ada anggaran.

Saya pikir ini kalau kita berjanji, saya pikir kita bilang aja *nggak* ada, jadi masyarakat *nggak* berharap. Waktu itu Kang Dedi itu Pimpin, inget *nggak* Kang Dedi kita ke Lampulo? Kita janji kan bahwa akan dibantu Kementerian KKP. Saya pikir *nggak* terlalu berat kok itu, asal kita serius. Tapi setiap saya tanya Pak Zaini katanya *nggak* ada anggaran, dengan mudah di bilang tidak ada anggaran. Saya pikir ini harus *clear*. Kalau memang *nggak* ada anggaran pada saat kita kunjungan bilang aja *nggak* ada anggaran, jadi sehingga masyarakat terus terang Pak Menteri itu ribuan nelayan itu. Saya setiap ke sana dibidang nih kita nih tipu-tipu nih Komisi IV nih. Jangan sampai kita datang tapi *nggak* pernah eksekusi. Saya tanya sama Pak Dirjen Tangkap, kata Pak Dirjen, waduh Pak Muslim kita emang *nggak* ada anggaran. *Wong* kita datang dengan Pak Dirjen, kita janji dengan mereka bikin acara. Ya saya pikir ini, ini masukan nih Pak Menteri. Artinya beberapa pelabuhan besar, di Aceh *nggak* banyak kok hanya 2, 3 yang kita sudah berjanji, kalau memang ada kapal keruk saya pikir *nggak* lama seminggu selesai itu. Jadi sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi.

Kemudian terakhir berkaitan Dirjen Budidaya ini. Pak Dirjen kita bareng-bareng kemarin kita ke Aceh, ini banyak sebenarnya yang menjadi masukan terhadap seperti indukan, kemarin saya lihat ada bantuan misalnya indukan ikan kerapu. Selama ini untuk mendapatkan indukan kan kita harus ngambil itu dari Surabaya, dari apa namanya itu Jawa Timur ya, Situbondo. Saya berpikir nanti kalau wilayah Sumatera ini kita harapkan paling *nggak* ada di Medan. Jadi sehingga *cost*-nya lebih besar ketimbang harga bibitnya Pak Ketua, ini perlu dipikirkan bukan hanya mungkin untuk Sumatera, wilayah Jawa seperti itu. Jadi ketika karena sangat dibutuhkan buat masyarakat, saya Pak Dirjen kan bareng-bareng kita lihat. Artinya kerapu ini sangat strategis dan sangat bernilai jual buat masyarakat, mudah-mudahan ke depan indukan

ini juga ada diperbantukan di beberapa titik misal di Sumatera juga ada, di Kalimantan, di Sulawesi, jadi tidak nanti ditumpuk di Pasuruan, akhirnya biaya pengiriman lebih mahal jadi. Sehingga nilai daripada masyarakat itu sangat kecil.

Mungkin terakhir Pak Ketua berkaitan dengan Dirjen Tangkap sudah, kemudian Dirjen Anggaran sudah. Kemudian Aceh baru-baru ini kan sudah banjir Pak ada di beberapa Kabupaten juga berharap juga untuk kali ini ada bantuan ekskavator lah ya. Ini terus terang Pak Dirjen ini mohon di *support* karena masyarakat di sana karena cukup parah kondisi di beberapa hal berkaitan dengan tambak-tambak udang masyarakat yang memang membutuhkan perhatian dari pemerintah.

Ini beberapa hal Pak Ketua. Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (RUSDI MASSE MAPPASESSU):

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih Pak Muslim.

Untuk berikutnya Mbak Alien. Silakan.

F-PG (ALIEN MUS):

Baik, Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan interupsi dulu Bu Kiki. Ini mau interupsi aja.

Assalamu'alaikum.

Ketua dan juga Bapak/Ibu Anggota Komisi IV yang saya muliakan, banggakan, dan saya cintai,
Tentunya Pak Menteri, Pak Sekjen, Pak Irjen, beserta jajaran Eselon I.

Langsung aja Pak Menteri. Kami dari Fraksi Partai Golkar sangat mendukung dengan apa yang sudah dilakukan tentang *automatic adjustment* ini memang tentunya dengan uang yang terbatas terus dilakukan lagi dengan *automatic adjustment*, dituntut lagi banyak kegiatan dan pengeluaran yang harus dilakukan. Tapi kami meminta agar *automatic adjustment* ini benar-benar dilakukan untuk tepat sasaran pemotongan anggarannya, tentunya tadi sudah disampaikan adanya perhatian yang khusus terhadap nelayan kecil dan juga bagaimana tentang kepentingan maslahat untuk hajat hidupnya para nelayan. Tentunya kami kemarin tahun 2021 sangat menyayangkan adanya pemotongan anggaran yang dilakukan di Dirjen Tangkap tentunya adalah di asuransi nelayan. Kami harapkan Pak Menteri karena beberapa provinsi

Indonesia termasuk dengan Kepri, terus juga daerah-daerah perairan laut yang sangat diharapkan bahwa nelayan itu mendapatkan asuransinya agar menjanjikan bahwa istri ini suaminya pergi untuk berlayar menangkap ikan pulang dengan selamat, tapi apabila terjadi sesuatu yang kami tidak inginkan juga mereka mendapatkan asuransi atau jaminan.

Kemudian Pak Menteri, saya mengharapkan Ketua ini kalau bisa dimasukkan dalam satu kesimpulan bahwa cantrang itu sangat dilarang, tidak diterkecualikan oleh nelayan siapapun, apapun, bagaimanapun, provinsi manapun, tolong ini dimasukkan di kesimpulan ya. Karena ada juga daerah-daerah tertentu yang mau mengajukan mungkin di Kementerian Kelautan pasti mereka juga diminta untuk ada pengecualian, tapi ini tolong jangan sampai ada pengecualian tentang alat tangkap cantrang.

Pak Menteri, nelayan kami di Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara dan perairan laut Indonesia timur sering terjadi nelayan yang pergi itu memancing selalu ada masalah, kemarin di Morotai baru saja ditemukan nelayan yang hilang selama 4 hari dan baru ditemukan oleh Angkatan Laut. Ini yang sangat kami terus sampaikan bahwa pengadaan kapal pengawasan di SDKP itu bagaimana sih, fungsi layarnya bagaimana sih, anggarannya pas *nggak* sih, gitu lho. Kalau memang penting ya ini juga menjadi *priority* kami karena kami kan batas wilayahnya dengan negara-negara tetangga itu sangat sangat dekat dan selalu menjadi *illegal fishing*.

Kemudian Pak Menteri, tadi pagi kami ada Kaukus Kelautan mengadakan *zoom meeting* bersama dengan AIPA, itu tadi dihadiri oleh Pak Pimpinan saya Pak Budi juga sangat mengapresiasi sekali bagaimana Indonesia negara kelautan kalau bisa bekerjasama tentang *illegal fishing* ini. Tentunya saya berharap dengan lobi melobi yang dilakukan oleh Pak Menteri baik dalam negeri dan luar negeri ini sangat dibutuhkan.

Untuk perubahan, saya pikir saya berterima kasih sekali karena ini di meja saya sudah ada penandatanganan paraf dari semua Dirjen, semoga tidak ada perubahan lagi. Tentunya Ketua Komisi, saya terima kasih karena sudah ada tambahan Bioflok, ini sangat bermanfaat sekali bagi kami yang ada di Dapil. Itu saja.

Ketua sebentar, semoga kemarin kan 14 Februari hari kasih sayang, semoga juga hari yang ke-15 ini tanggal 15 ini di bulan Februari KKP juga memberikan satu janji manis yang memang mudah-mudahan bisa memberikan.. manis manis soalnya Menterinya kalau senyum manis tapi kalau pakai masker *nggak* kelihatan, *eudeuh*, dapat Bioflok berapa ini kita tambahan extra. Itu saja. Pak Sekjen, *Alhamdulillah* udah negatif, tapi bahaya juga nih kalau udah Covid.

Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (RUSDI MASSE MAPPASESSU):

Terima kasih Mbak Alien.

Yang jelas hari ini yang apa yang diharapkan oleh Mbak Alien bila apa janji manis *Insha Allah* mudah-mudahan kedepannya Pak Dirjen Perikanan Tangkap ini lebih komunikasi lagi dengan Anggota, dengan teman-teman yang ada di IV. Saya kira itu Pak Menteri harapannya teman-teman di sini.

Masih ada? Silakan.

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si.,M.P.A.):

Ya, Terima kasih Pimpinan.

Pak Menteri,
Bapak/Ibu Anggota yang berbahagia,

Saya hanya ingin mengingatkan pada rapat terakhir kemarin dengan pejabat Eselon I yang terkait dengan aspirasi para nelayan yang dibantu oleh Pak Menteri. Jadi mereka hanya meminta belas kasih lah kalau boleh bilang begitu dari Pak Menteri agar diperbolehkan mereka melaut mengingat ini sebentar lagi bulan puasa dan tentu ada Lebaran, jadi kalau ada ratusan nelayan yang tak bisa melaut apa kita bisa menanggung hidup mereka dan keluarganya. Saya kira kemarin kesepakatannya memang menunggu kehadiran Pak Menteri untuk bisa memberikan respon langsung dan yang kita harapkan respon Pak Menteri adalah memberikan kesempatan mereka sebagai semata-mata ini pemenuhan hak dan juga kasih lah sama mereka.

Terima kasih Pak Menteri.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (RUSDI MASSE MAPPASESSU):

Terima kasih Bu Luluk.

Bukan cuma nelayan Bu mau lebaran, kita pun mau lebaran.
Masih ada yang lain?

F-PG (ALIEN MUS):

Interupsi Pimpinan.

Tidak ada pengecualian untuk cantrang, pertama. Kedua, ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang KKP, jangan *me-lex specialis*-kan sesuatu dan kelompok dan golongan.

Tolong ini harus di catat, karena kalau begini berarti Pak Menteri bisa juga jadi sasaran tembak nih. Karena kemarin yang saya baca karena saya masuk ke dalam kelompok nelayan Indonesia, jadi apapun yang menjadi

permasalahan di semua provinsi, disampaikan ke saya. Jadi tolong tolong jangan ada pengecualian dan saya tidak setuju itu.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (RUSDI MASSE MAPPASESSU):

Terima kasih Ibu Alien, tegas sekali Ibu Alien.

Yang lain? Sudah *nggak* ada.

ANGGOTA KOMISI IV:

Ketua.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (RUSDI MASSE MAPPASESSU):

Sudah.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Kalau Pak Dedi asal udah Biofloknya aman, udah lah. *Sok atuh mangga* kan gitu kan Kang Dedi.

Silakan di jawab Pak Menteri. Karena tadi jadwal kita jam 4 harus selesai.

Terima kasih.

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Baik, terima kasih.

Terima kasih ini rapat yang sangat luar biasa, saya bisa memahami sehingga akibat dari memahami itu saya tidak terlalu bertele-tele.

Janji manis *Insya Allah* saya minta sama Pak Sekjen agar paling telat itu semester pertama 2022 ini selesai, tapi harapan saya April sudah selesai harusnya ya. Sebenarnya harusnya sekarang sudah bisa mulai bergerak juga Pak, cuma karena Kepala Biro-nya beliau juga kena Covid ini banyak sekali ini, ini juga akhirnya kita undurkan sampai dengan semester pertama, tapi kita akan kejar terus *Insya Allah*, begitu.

Terima kasih.

Terus yang kemudian soal yang di Kebumen Ibu. Tentu itu ada 4 wilayah, tidak hanya di Kebumen, ada di..

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (RUSDI MASSE MAPPASESSU):

Pak Menteri izin sebentar ya. Ada Kang Dedi sebentar, coba silakan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Saya ngingetin aja pesen pengalaman yang tahun ini. Kalau kirim barang itu daripada banyak dibuang lebih baik sedikit bermutu.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Tahun lalu Kang, bukan tahun ini.

F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H. / WAKIL KETUA DPR RI):

Iya iya, tahun lalu.

Misalnya kalau bibit ikan, namanya bibit itu gede Pak. Ini bibit segede gini bukan bibit namanya. Terus kemudian namanya bahan ikan anak ikan kita itu biasa nanam yang segini, jangan di yang segede yang sebiji dili apa namanya lidi. Terus kirim pakan jangan kirim pakan begitu ikannya dikasih pakan, ikannya mati gitu lho Pak, ikannya mati akhirnya tidak dipakai, itu kan duit dibuangin tuh. Nanti ke depan itu daripada banyak tidak bermanfaat, lebih baik sedikit berkualitas.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (RUSDI MASSE MAPPASESSU):

Ayo silakan Pak Menteri.

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Terima kasih Pak Dedi.

Udah ada juknisnya dan kita sudah ubah sesuai dengan keinginan para Anggota Dewan. Iya, mewakili dari masyarakat jadi kita ubah kalau contoh Nila dari 3 menjadi 8, jadi 5 kira-kira begitu. Jadi ini sudah sudah besar juga program untuk 2022, sudah remaja sekali, sangat remaja malah.

Jadi Ibu yang untuk apa namanya tambak udang, ada beberapa hal di sana yang perlu kita sedang pelajari kita tidak menginginkan adanya satu permasalahan di sana. Itu menjadi bagian dari 4 wilayah yang rencananya akan dilakukan *groundbreaking* oleh Bapak Presiden itu di Muna, kemudian di Sumbawa, dan kemudian di Aceh Timur. Nah satu lagi itu harapan kami sebetulnya Kebumen. Mudah-mudahan ini Kebumen ini tidak ada masalah, syukur-syukur nanti kita bisa perlebar jumlahnya tidak 100 tapi 200 dan kemudian di atasnya itu harapan kami adalah masyarakat yang memang yang apa namanya berbudidaya di situ. Itu diantaranya Ibu.

Saya kira demikian Ketua yang bisa saya sampaikan.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Pimpinan. Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Pelan-pelan aja ngomongnya.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Iya.

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Ibu, satu lagi nih Bu sebelum interupsi nih.

Saya mau ucapin begini, mohon maaf lah kalau Pak Zaini agak terlambat karena lagi kena Covid juga baru selesai.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Boleh interupsi Pimpinan.

Begini Pak Menteri ya, kalau kita ngomongnya baru satu kali *nggak* apa Pak Menteri, ini udah sering. Jangan mentang-mentang akrab sama Bos gua, terus cuek, iya kan. Ada deh, ya. *Nggak*, bener, kita serius loh Pak. Kalau saya mohon dengan segala rasa hormat kalau Pak Zaini *nggak* percaya barangnya itu *nggak* ada gunanya, ikut saya, kita cek sendiri. Mohon izin Pak Menteri, biar percaya. Jadi saya kepengen negara itu keluarin *duit* *kagak* rugi, gitu.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Tolong Pak Zaini itu jadi perhatian, jangan sampai ada pengadaan barang tapi mangkrak karena itu kan uang uang rakyat ya. Itu mungkin bukan dari Kiki saja tetapi dari yang lain juga akan komplain seperti itu. Ya tolong sekali lagi tolong lebih diperhatikan.

Lanjut Pak Menteri.

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Baik. Saya rasa sudah cukup Ketua. Terima kasih.

Saya akan mensupervisi Ibu Kiki, saya akan supervisi Pak Zaini.

F-PG (ALIEN MUS):

Pimpinan. Pimpinan, izin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PG (ALIEN MUS):

Konkrit to the point.

Pak Menteri izin. Saya juga *nggak* tahu ini Pak Zaini yang mana, kayaknya mungkin saya juga perlu kenalan sama Pak Zaini. Tapi Pak Menteri saya mau ingatkan kembali karena ini yang sudah ke sekian kali dan sudah masuk di Baleg untuk Undang-Undang Konservasi belum ada penyesuaian dari Kementerian KKP, tolong mungkin *draft*-nya sudah harus disediakan, ini yang ke sekian kali.

Terus Pak Menteri, kemarin juga untuk di budidaya kami ingin menyampaikan bahwa penekanan tentang benih itu memang di tempatnya kalau bisa memang fokus sama.. jika di setiap daerah Provinsi itu ada budidaya yang terbesar kalau bisa pakannya dari situ jangan dari luar Provinsi lain karena memang sangat susah Pak. Kayak saya dari Ambon juga Pak bawa ke Malut ya hitung-hitung lagi kalau 1.000 kalau dihitung mungkin yang mati lebih banyak yang mati Pak, jadi seperti itu.

Itu saja. Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Terima kasih kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang telah menyampaikan jawabannya.

Bapak dan Ibu yang saya hormati,

Dari dialog diskusi, saran, dan masukan Anggota Komisi IV sebelum acara ini kami akhiri kami akan bacakan rancangan kesimpulan Rapat Kerja pada hari ini.

Silakan Pak Budi.

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Pimpinan kok rapat yang paling ekspres kayaknya sama KKP nih.

WAKIL KETUA IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Pak Ketua.

Izinkan kami membacakan kesimpulan keputusan Rapat Kerja pada hari ini. Waduh ini kita kebagian yang angka-angka Pak Ketua. Siap Pak Ketua.

Kesimpulan Keputusan:

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Pencadangan Anggaran (*Automatic Adjustment*) Belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 sebesar Rp296.586.883.000,00 dari Pagu Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp6.115.967.397.000,00, dengan rincian per Eselon I sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp27.024.782.000,00;
 - b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp4.146.321.000,00;
 - c. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebesar Rp36.171.997.000,00;
 - d. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebesar Rp55.796.309.000,00;
 - e. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp45.391.291.000,00;
 - f. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebesar Rp18.945.751.000,00;
 - g. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebesar Rp19.022.809.000,00;
 - h. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebesar Rp67.723.598.000,00;
 - i. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan sebesar Rp22.364.025.000,00.

Sudah? Turun lagi.

Komisi IV?

Pemerintah?

**KETUK PALU 1X
(RAPAT: SETUJU)**

2. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kementerian Kelautan dan Perikanan atas usulan perubahan Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022, dengan rincian per Eselon I sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Jenderal semula sebesar Rp586.852.843.000,00 menjadi sebesar Rp621.352.663.000,00;
 - b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp82.552.663.000,00;
 - c. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebesar Rp792.182.368.000,00;
 - d. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya semula sebesar Rp1.126.150.911.000,00 menjadi sebesar Rp1.071.650.911.000,00;
 - e. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan semula sebesar Rp903.734.145.000 menjadi sebesar Rp923.734.145.000,00;

- f. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebesar Rp377.207.204.000,00;
- g. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebesar Rp378.741.417.000,00;
- h. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.375.102.199.000,00; dan
- i. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebesar Rp493.439.646.000,00.

Komisi IV?

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Pak Budi, Pimpinan.

WAKIL KETUA IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Ada interupsi apa Bu Kiki?

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Nggak. Cuma mau memastikan aja, nomenklturnya masih Badan Riset ya?

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Sampai sampai *clear* pemindahannya karena ada beberapa yang belum oh sudah dipindahkan, tapi perlu verifikasi.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Iya. Saya mastiin itu aja Pak Budi.

Terima kasih.

WAKIL KETUA IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Ini sangat penting Pak Menteri supaya Bu Kiki *nggak* banyak interupsi lagi Pak Menteri.

Pemerintah setuju?

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Setuju.

WAKIL KETUA IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

**KETUK PALU 1X
(RAPAT: SETUJU)**

3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkomitmen menjaga sumber daya kelautan dan perikanan dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap nelayan, agar menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Komisi IV?
Pak Menteri?

**KETUK PALU 1X
(RAPAT: SETUJU)**

Selesai Ketua.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Udah Pimpinan, segitu doang?

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Nanti kalau banyak kesimpulannya banyak banget, sedikit, sedikit banget.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Sebelum kami menutup Rapat Kerja hari ini, kami persilakan saudara Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan kata penutup dalam Rapat Kerja hari ini. Silakan.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Pak Ketua, bisa interupsi sedikit Ketua?

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Oh boleh, banyak juga boleh.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Nggak, sedikit.

Pak Menteri mohon maaf. Saya ini mungkin teknis tapi penting. Saya mau tanya informasi Pak Zaini ini kapan pensiunnya? *Nggak*, ini saya tanya serius Pak, saya *nggak* biasa *nggak* serius, kapan pensiunnya Pak?

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

2 tahun lagi.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Masih lama? Oh masih 2 tahun. Oh kalau masih 2 tahun berarti ini serius Pak, mohon tolong di atensi Pak Menteri. Itu aja. Tapi kalau sudah mau pensiun, saya udah *nggak* komentar lagi Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya silakan Pak Menteri.

MENTERI KKP (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rapat yang luar biasa, baik, dan bagus. Mudah-mudahan rapat ke depan juga terus seperti ini, jadi menarik buat kita. Saya kira apa yang menjadi masukan dari seluruh fraksi dan Anggota Dewan akan menjadi masukan yang baik buat kita dan akan segera kita tindaklanjuti.

Ada beberapa hal tadi yang menjadi beban di hati, saya mohon maaf dan saya berjanji juga untuk selalu ikut apa namanya memikirkan supaya segalanya bisa berjalan dengan baik.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Terima kasih.

Pak Zaini, ini kritik bukan kritik tidak suka, tetapi kritik membangun baik dari Mbak Kiki, Bu Alien, dan Pak Ansi dan yang lain-lain. Perbaiki komunikasi dengan teman Komisi IV seluruhnya ya.

Terakhir sebelum, saya menyampaikan penutup, saya mau tanya kapal pasir yang sedot itu sekarang posisinya ada dimana? Pak Dirjen SDKP, dijawab.

DIRJEN PSDKP:

Masih di Pulau Rupert Bapak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Masih di Pulau Rupert?

DIRJEN PSDKP:

Siap.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Belum ditarik?

DIRJEN PSDKP:

Posisinya ditarik dari Pulau Rupas menuju kearah KSOP. Jadi awalnya dari Dumai itu kurang lebih sekitar 3 jam karena kami kemarin meninjau, jadi kurang lebih sekitar 40 menit Pak dari Pelabuhan Dumai. Di dalam konteks pemeriksaan lanjutan jadi memudahkan untuk pelaksanaan pemeriksaan lebih lanjut.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Pemiliknya sudah tahu?

DIRJEN PSDKP:

Hari ini kami membuat surat pemanggilan kepada PT Logomas, Direktur PT Logomas.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya kalau sudah ketahuan ditangkap aja udah, karena itu kan merusak alam, laut Indonesia.

DIRJEN PSDKP:

Siap.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Terima kasih.

Dengan demikian berakhir sudah Rapat Kerja pada hari ini. Atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV mohon maaf apabila selama kami memimpin rapat ini ada kekurangan kekhilafan. Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirrabil'alam* Rapat Kerja ini kami tutup.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari ini atensinya hebat sekali Pak Menteri, yang datang Pimpinannya 5, Anggotanya pun 5, jadi 10.

**KETUK PALU 3X
(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.30 WIB)**

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

Drs. ACHMAD AGUS THOMY
NIP. 196508171988031002